

Implikasi Ketidadaan Jam Layanan BK terhadap Pelaksanaan Program Bimbingan di Madrasah Tsanawiyah Negeri

Nurul Izzah Subhan^{1*}, Norma Majid², Faza Wasfiyah³, Nur Fajrina Rakhmawati⁴

¹Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bulukumba

²Universitas Negeri Malang

³Universitas Islam As'adiyah Sengkang

⁴SMPN 2 Gunungsindur

Correspondence E-mail: izzahsubhan00@gmail.com*

Abstract. *This study aims to describe the implications of the absence of allocated guidance and counseling service hours for the implementation of counseling programs at Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bulukumba. Using a descriptive qualitative approach, the research involved the school counselor as the main participant, supported by the principal, homeroom teachers, subject teachers, and several students who interact directly with counseling services. Data were collected through participatory observation, semi-structured interviews, and documentation of counseling program activities. The analysis followed the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the lack of scheduled counseling hours leads to irregular program implementation and limits the delivery of preventive and developmental services. Counseling activities are provided situationally, often by requesting time from teachers or utilizing available free periods, causing unequal access to classroom guidance. The findings also indicate that the counselor continues to conduct needs assessments, deliver priority materials, and provide responsive individual counseling to address interpersonal conflicts. Overall, the absence of structured service hours reduces program continuity and highlights the need for more consistent scheduling or strengthened collaboration to support ongoing student development.*

Keywords: *guidance and counseling, program implementation, madrasah, counselor role*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikasi ketidadaan jam layanan Bimbingan dan Konseling terhadap pelaksanaan program bimbingan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bulukumba. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan guru BK sebagai subjek utama serta kepala madrasah, wali kelas, guru mata pelajaran, dan siswa sebagai informan pendukung. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidadaan jam layanan membuat pelaksanaan program BK menjadi tidak terjadwal dan membatasi pemberian layanan preventif. Layanan klasikal hanya dapat dilakukan ketika tersedia kelas kosong atau setelah memperoleh izin guru mata pelajaran sehingga belum menjangkau seluruh siswa. Temuan juga menunjukkan bahwa guru BK tetap menjalankan asesmen kebutuhan, memberikan materi prioritas, serta melakukan konseling individual*

dalam menangani konflik siswa. Kondisi ini menegaskan perlunya penjadwalan layanan BK yang lebih konsisten untuk mendukung perkembangan siswa secara berkelanjutan.

Kata kunci: *bimbingan dan konseling; pelaksanaan program; madrasah; peran guru BK*

PENDAHULUAN

Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang berfungsi membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal secara pribadi, sosial, belajar, dan karier (Saputri et al., 2025). Dalam konteks pendidikan madrasah, layanan BK memiliki posisi strategis tidak hanya untuk mendukung keberhasilan akademik, tetapi juga dalam menanamkan nilai moral, spiritual, dan karakter Islami yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama (Munadi & Suwarta, 2020). Perubahan sosial yang cepat, tantangan moral remaja, serta kompleksitas kebutuhan peserta didik menuntut layanan BK yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Peran strategis tersebut menuntut pelaksanaan layanan BK yang tidak hanya bersifat responsif terhadap permasalahan siswa, tetapi juga proaktif dalam mengembangkan potensi dan karakter peserta didik. Agar tujuan tersebut tercapai, layanan BK perlu terintegrasi secara sistematis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan di madrasah, mulai dari perencanaan program hingga pelaksanaan pembelajaran sehari-hari.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7232 Tahun 2020 Tentang Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling Madrasah secara tegas menyatakan bahwa layanan BK merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan yang wajib dikelola secara terencana dan berkesinambungan. Artinya, madrasah perlu menetapkan waktu khusus agar layanan BK dapat terlaksana sesuai prinsip profesionalitas. Sejalan dengan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling, bahwa guru Bimbingan dan Konseling wajib diberikan jam tatap muka secara terjadwal minimal 1 jam per minggu untuk mendukung layanan klasikal. Namun demikian, pelaksanaan layanan BK di banyak madrasah masih menghadapi kendala struktural yang signifikan, salah satunya adalah ketiadaan alokasi jam layanan yang tetap dalam jadwal pelajaran. Kondisi ini membuat pelaksanaan program bimbingan menjadi tidak terjadwal, cenderung bersifat insidental, dan kurang mendapat dukungan dari pihak sekolah.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan fenomena serupa bahwa guru BK di sekolah yang tidak memiliki jam masuk kelas tetap kesulitan melaksanakan layanan klasikal secara sistematis dan hanya mampu melakukan layanan berupa responsif atau insidental (Qomariyah et al., 2025). Beberapa studi lain juga menyoroti bahwa keberhasilan program BK sangat bergantung pada dukungan kebijakan sekolah dan

alokasi waktu yang memadai untuk pelaksanaan layanan (Fitriani et al., 2022). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan di sekolah umum, bukan di madrasah yang memiliki sistem nilai dan regulasi berbeda. Belum banyak kajian yang menggambarkan implikasi ketiadaan jam layanan BK dalam konteks madrasah negeri serta bagaimana guru BK beradaptasi dengan kondisi tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu mengemukakan tentang ketiadaan alokasi jam masuk kelas BK untuk melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Guru BK mengalami kendala pada aspek jam layanan BK yang berdampak pada pelaksanaan program BK secara menyeluruh, termasuk evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut layanan. Hal ini sejalan dengan penjelasan teoritis bahwa ketiadaan atau ketidaksesuaian jam layanan BK dapat menghambat efektivitas program bimbingan di sekolah atau madrasah (Farozi et al., 2017). Ketidadaan jam khusus untuk guru BK masih menjadi kendala bagi guru BK di berbagai sekolah. Ketidadaan jam khusus BK menghambat perencanaan program yang telah disusun sehingga guru BK tidak dapat melaksanakan program di kelas sesuai dengan perencanaan (Walidaini et al., 2024). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketiadaan alokasi jam layanan BK bukan sekadar persoalan teknis penjadwalan, melainkan isu yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan sistem layanan di sekolah ataupun madrasah. Tanpa dukungan kebijakan yang menetapkan jam layanan secara resmi, guru BK akan terus berada dalam posisi reaktif dan terbatas, sehingga tujuan pembinaan peserta didik secara menyeluruh sulit tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikasi ketiadaan jam layanan BK terhadap pelaksanaan program bimbingan di madrasah serta mengidentifikasi upaya guru BK dalam mempertahankan efektivitas layanan di tengah keterbatasan waktu. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman empiris tentang pentingnya kebijakan penetapan jam layanan BK sebagai langkah strategis dalam mewujudkan layanan yang profesional, inklusif, dan berkelanjutan di madrasah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam implikasi ketiadaan jam layanan Bimbingan dan Konseling terhadap pelaksanaan program bimbingan di madrasah. Penelitian dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bulukumba. Subjek utama penelitian adalah guru Bimbingan dan Konseling, sementara kepala madrasah, wali kelas, guru mata pelajaran, dan beberapa siswa dilibatkan sebagai informan pendukung karena keterlibatan langsung mereka dalam dinamika pelaksanaan layanan BK.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) observasi partisipatif selama proses layanan klasikal, supervisi siswa, dan konseling individual; (2) wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pola interaksi terkait layanan BK; serta (3) dokumentasi, berupa hasil asesmen kebutuhan, catatan layanan, dan struktur jadwal pelajaran.

Analisis data dilakukan mengikuti langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara reflektif. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta proses refleksi berkelanjutan peneliti terhadap temuan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur dengan guru Bimbingan dan Konseling, serta studi dokumentasi terhadap pelaksanaan layanan. Temuan penelitian difokuskan pada implikasi ketiadaan jam layanan BK terhadap pelaksanaan program bimbingan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bulukumba.

1. Ketidadaan Jam Layanan BK dalam Jadwal Pembelajaran

Layanan Bimbingan dan Konseling belum tercantum dalam struktur jadwal pelajaran mingguan di madrasah. Tidak adanya alokasi waktu khusus menyebabkan layanan tidak dapat dilaksanakan secara rutin dan sistematis. Untuk melaksanakan layanan klasikal, guru BK meminta izin kepada guru mata pelajaran satu hari sebelumnya, atau memanfaatkan kelas yang sedang kosong ketika melakukan observasi. Kondisi ini membuat pelaksanaan layanan bergantung pada fleksibilitas jadwal dan situasi lapangan, bukan perencanaan terstruktur. Meskipun demikian, guru mata pelajaran umumnya bersikap kooperatif dan memberikan izin ketika diminta, sebagai bentuk dukungan terhadap layanan BK.

2. Proses Asesmen Kebutuhan dan Penentuan Materi Prioritas

Pelaksanaan program diawali dengan asesmen kebutuhan menggunakan IMU PD, yang dilakukan secara bertahap (diciil per kelas). Wali kelas mendampingi pengisian angket, sehingga turut memahami fungsi asesmen sebagai dasar perencanaan layanan. Hasil asesmen menunjukkan kebutuhan pada aspek penentuan skala prioritas dalam belajar dan kemampuan memilih lingkungan pertemanan yang sehat.

Selain itu, observasi guru BK menemukan isu yang sangat dominan, yaitu penggunaan bahasa kurang santun dalam interaksi sehari-hari. Siswa sering saling mengejek, berbicara dengan nada tinggi, atau menyebut nama orang tua sebagai candaan yang memicu

konflik. Karena itu, guru BK memutuskan memprioritaskan materi menjaga lisan dan etika komunikasi sebagai bagian dari layanan klasikal pada kelas VII.

3. Pelaksanaan Layanan Klasikal dan Dinamika Kelas

Layanan klasikal telah dilaksanakan dengan frekuensi yang berbeda pada masing-masing kelas, umumnya 1–2 kali pada semester berjalan. Suasana awal kelas cenderung gaduh, mencerminkan dinamika siswa tahap transisi dari sekolah dasar menuju madrasah. Namun, guru BK menggunakan ice breaking, pembagian kelompok, tugas berbasis LKPD, dan permainan edukatif untuk mengalihkan perhatian dan meningkatkan keterlibatan siswa. Cara ini terbukti membantu siswa menjadi lebih fokus dan responsif selama proses bimbingan. Ketika materi mengenai menjaga lisan disampaikan, sebagian siswa merespon dengan tertawa atau saling menyenggol karena merasa materi tersebut dekat dengan situasi sehari-hari. Hal ini menjadi pintu masuk bagi guru BK untuk mengajak refleksi moral melalui dialog dan contoh kasus ringan.

4. Konseling Individual dan Mediasi Konflik

Konseling individual bersifat responsif. Sebagian besar siswa datang ke ruang BK setelah diarahkan oleh wali kelas atau guru mata pelajaran ketika konflik terjadi. Guru BK mengedepankan pendekatan empatik, non-judgmental, dan menerima, sehingga siswa umumnya mau terbuka.

Salah satu pola kasus yang paling sering ditemukan adalah pertengkaran akibat penggunaan bahasa yang melukai. Dalam situasi tersebut, guru BK:

1. Mengajak siswa duduk bersama,
2. Mendengarkan kronologi dari masing-masing pihak,
3. Membantu siswa memahami maksud dan dampak ucapannya,
4. Memfasilitasi mediasi dan kesepakatan perbaikan perilaku.

Melalui proses ini, siswa dapat saling meminta maaf dan memperbaiki pola interaksi.

5. Pembagian Tugas Guru BK dan Persepsi Guru Lain

Secara struktural terdapat dua guru BK, namun hanya satu yang berlatar belakang pendidikan BK. Akibatnya, layanan yang bersifat kuratif, preventif, serta asesmen lebih banyak dipegang oleh guru BK tersebut, termasuk untuk siswa kelas VIII dan IX. Guru mata pelajaran dan wali kelas mendukung, namun sebagian dari mereka masih memahami layanan BK sebagai upaya penyelesaian masalah, bukan pembinaan preventif berkelanjutan.

6. Dampak terhadap Pembinaan Karakter dan Efektivitas Program

Ketiadaan jam layanan menyebabkan program bimbingan lebih banyak berjalan secara reaktif. Layanan preventif tidak dapat dilakukan secara merata pada seluruh kelas, sehingga pembinaan karakter tidak berlangsung secara utuh dan berkelanjutan. Guru BK menyadari perlunya strategi baru agar program tidak hanya menangani masalah yang

muncul, melainkan juga membentuk budaya komunikasi yang santun dan saling menghargai. Sampai saat ini, guru BK masih dalam fase memahami karakter lingkungan sekolah, sambil mengembangkan strategi kolaboratif dan digital seperti akun Instagram BK sebagai media informasi edukatif. Upaya ini merupakan bentuk refleksi profesional untuk mencari pola layanan yang lebih efektif dan adaptif.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan alokasi jam layanan Bimbingan dan Konseling berdampak langsung pada keteraturan, kontinuitas, dan jangkauan program bimbingan di madrasah. Pelaksanaan layanan menjadi situasional, bergantung pada ketersediaan waktu guru mata pelajaran atau kondisi kelas, bukan pada kerangka jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan *kesenjangan* antara kondisi nyata) dan kondisi ideal. Secara ideal, layanan BK merupakan bagian integral dari kurikulum dan memerlukan jadwal yang terstruktur untuk menjamin keberlangsungan program (Panjaitan et al., 2025). Namun, dalam praktik di madrasah, dukungan struktural tersebut belum sepenuhnya terimplementasi.

Pelaksanaan asesmen kebutuhan yang dilakukan secara bertahap menunjukkan bahwa guru BK telah berupaya menyusun program berdasarkan data dan kebutuhan riil siswa. Hal ini sejalan dengan prinsip *comprehensive guidance and counseling model*, yang menekankan pentingnya needs assessment sebagai dasar perencanaan layanan (ASCA, 2019). Namun, hasil asesmen belum sepenuhnya dapat diterjemahkan menjadi layanan klasikal yang berkelanjutan karena keterbatasan waktu. Akibatnya, layanan preventif dan pengembangan diri belum terfasilitasi secara optimal.

Kondisi ini berdampak pada pola layanan yang lebih bersifat responsif (kuratif). Guru BK lebih sering terlibat pada penanganan konflik interpersonal, terutama terkait penggunaan bahasa yang kurang santun di antara siswa. Temuan ini relevan dengan penelitian (Walidaini et al., 2024), yang menunjukkan bahwa ketiadaan jam khusus membuat layanan BK berfokus pada penanganan masalah, bukan pembinaan karakter secara sistematis. Di MTsN 3 Bulukumba, upaya guru BK memfasilitasi mediasi dan dialog empatik menunjukkan bahwa fungsi pemulihan relasi sosial masih dapat berjalan, meskipun dalam skala terbatas.

Selain itu, dinamika pelaksanaan layanan klasikal menunjukkan bahwa metode penyampaian memainkan peran penting dalam menjaga keterlibatan siswa. Penggunaan *ice breaking*, tugas kelompok, dan permainan edukatif menjadi strategi efektif untuk mengatasi suasana kelas yang cenderung gaduh, terutama pada siswa kelas VII yang sedang berada pada fase penyesuaian lingkungan baru. Strategi ini mencerminkan kemampuan guru BK untuk melakukan penyesuaian pedagogis sesuai konteks

perkembangan peserta didik. Pendekatan tersebut konsisten dengan prinsip layanan BK berbasis perkembangan (*developmental guidance*), yaitu memfasilitasi peserta didik melalui pengalaman belajar yang aktif dan partisipatif (Amalia & Haryadi, 2025).

Dari perspektif hubungan kerja, data menunjukkan bahwa guru mata pelajaran dan wali kelas bersikap mendukung, namun pemahaman mereka terhadap layanan BK masih cenderung terbatas pada fungsi penanganan masalah. Hal ini memperlihatkan perlunya penguatan peran BK dalam budaya sekolah agar program bimbingan dipandang sebagai instrumen pembinaan karakter yang bersifat preventif, bukan sekadar reaktif. Kolaborasi lintas peran (BK–wali kelas–guru mapel) menjadi aspek kunci dalam memperkuat keberhasilan layanan di madrasah. Dalam konteks reflektif, guru BK menyadari bahwa ketiadaan alokasi jam bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut hak siswa untuk mendapatkan pendampingan perkembangan diri secara sistematis.

Upaya strategi adaptif yang dilakukan guru BK, termasuk pemanfaatan media digital seperti akun Instagram sebagai sarana layanan informasi dan penguatan pesan moral, menunjukkan kemampuan untuk berinovasi dalam keterbatasan. Hal ini sejalan dengan pandangan *reflective practitioner* (Schön, 1983), bahwa pendidik yang profesional tidak hanya menjalankan prosedur, tetapi juga melakukan penyesuaian reflektif terhadap situasi nyata. Penelitian ini menegaskan bahwa penetapan jam layanan BK tidak hanya penting untuk kepentingan teknis pelaksanaan program, tetapi merupakan langkah strategis dalam penguatan budaya sekolah berbasis pembinaan karakter. Kebijakan penjadwalan BK yang terstruktur akan memungkinkan layanan berjalan secara preventif, merata, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan jam layanan BK menyebabkan program bimbingan di MTsN 3 Bulukumba berlangsung tidak terstruktur dan lebih berfokus pada penanganan masalah yang muncul, sementara layanan preventif dan pengembangan karakter belum terlaksana secara optimal. Layanan klasikal hanya dapat diberikan secara insidental sehingga tidak menjangkau seluruh peserta didik. Meskipun demikian, guru BK tetap berupaya menjalankan layanan melalui asesmen kebutuhan, penyampaian materi prioritas, konseling individual, dan mediasi konflik sebagai bentuk strategi adaptif di tengah keterbatasan waktu. Temuan ini menegaskan pentingnya penetapan jam layanan BK dalam jadwal pembelajaran atau penguatan mekanisme kolaboratif agar layanan bimbingan dapat berlangsung secara preventif, merata, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu adapun saran yang disampaikan terkait dengan penelitian ini Adalah:

1. Bagi Pihak Madrasah. Madrasah perlu mempertimbangkan penyusunan kebijakan internal terkait alokasi jam layanan BK dalam jadwal pembelajaran. Kebijakan ini diharapkan mendukung pelaksanaan layanan yang terencana, merata, dan berkelanjutan. Apabila penetapan jam belum memungkinkan, madrasah dapat menerapkan strategi alternatif berupa penjadwalan layanan berskala mingguan atau per tema, serta memperkuat koordinasi antara guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran untuk mencipta suasana pembinaan karakter yang lebih terpadu.
2. Bagi Guru BK. Guru BK disarankan untuk terus mengembangkan strategi layanan preventif, seperti penyusunan modul layanan klasikal sederhana, pelaksanaan kegiatan bimbingan berbasis kelompok kecil, serta pemanfaatan media digital (misalnya akun Instagram atau papan informasi BK) untuk memperluas jangkauan layanan. Selain itu, kolaborasi aktif dengan wali kelas dan guru mata pelajaran perlu ditingkatkan agar nilai-nilai karakter dan etika komunikasi dapat diinternalisasikan dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari.
3. Bagi Guru Mata Pelajaran dan Wali Kelas. Perlu adanya pemahaman bersama mengenai fungsi BK sebagai upaya pembinaan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Guru mata pelajaran dan wali kelas dapat berperan sebagai mitra yang mendeteksi dini masalah siswa, memberikan dukungan interaksi positif, serta memfasilitasi ruang bagi guru BK untuk masuk kelas ketika diperlukan.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya. Penelitian berikutnya dapat mengkaji model integrasi layanan BK dalam pembelajaran atau mengevaluasi efektivitas media digital sebagai sarana penunjang layanan BK yang bersifat preventif. Kajian komparatif antar madrasah juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang dapat direplikasi.

REFERENSI

- Amalia, R., & Haryadi, R. (2025). EXPLORING THE ROLE OF DEVELOPMENTAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN THE MERDEKA CURRICULUM. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling: Teori Dan Praktik)*, 9(1), 41–61.
- American School Counselor Association. (2019). *The ASCA National Model: A framework for school counseling programs (4 th ed.)*.
- Asfeldt, M., & Stonehouse, P. (2021). On becoming a reflective practitioner. In *Outdoor environmental education in higher education: International perspectives* (pp. 337–348). Springer.
- Farozin, M., Suwarjo, S., & Astuti, B. (2017). Identifikasi permasalahan perancangan program bimbingan dan konseling pada guru SMK di Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 10(1), 40–52.
- Fitriani, E., Neviyarni, N., Mudjiran, M., & Nirwana, H. (2022). Problematika layanan bimbingan dan konseling di sekolah. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 1(3), 174–180.
- Munadi, M., & Suwarta, S. (2020). Pengembangan Spiritualitas Melalui Layanan Bimbingan Konseling Di Madrasah Dan Sekolah. *Al-Tazkiah Jurnal Bimbingan Dan*

Konseling Islam, 9(2), 71–94.

- Panjaitan, N. S., Adira, M. L., & Lesmana, G. (2025). Eksistensi Peran Bimbingan dan Konseling Dalam Regulasi Pendidikan. *Edukatif*, 3(1), 36–45.
- Qomariyah, I. N., Maradika, A. W. Y., Salsabila, F., Amelia, U. N., & Lianawati, A. (2025). Analisis Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling oleh Guru BK di Sekolah yang Tidak Diberikan Alokasi Jam Masuk Kelas. *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 5(2), 115–130.
- Saputri, C., Zanti, L., Ramadhani, W. A., Azzahra, W. E., Lestari, A., Hafizah, N., Husni, Z. T., & Aini, N. (2025). FUNGSI DAN ASAS BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENUNJANG PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK. *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, 6(3).
- Walidaini, B., Mahara, R. A., & Maulida, F. (2024). Pelaksanaan Program BK pada SMA N 1 Takengon. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 18(1).